

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

(Studi Kasus di Desa Lalayau dan Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan)

Herlyna Dresti Kumala¹, Arif Budiman², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : Herlynadk@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan implementasi Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan meliputi masih banyaknya petani yang memiliki lahan tetapi tidak termasuk dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Aparat Desa dan sumber daya sarana pertanian yang masih terbatas. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Desa Lalayau dan Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan) belum optimal dilihat dari indikator Pertama, pada aspek kondisi lingkungan. Kedua, pada aspek hubungan antar organisasi, Ketiga, pada aspek sumber daya, Keempat, pada aspek karakter institusi implementor. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendorong yakni informasi yang cukup memadai dalam proses pendataan, kemudian faktor penghambat meliputi masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi program bantuan, tingginya angka kemiskinan masyarakat desa dan pengawasan yang kurang baik terhadap proses pendataan masyarakat dan koordinasi yang rendah antara pemerintah dengan aparat desa setempat dan pembinaan yang kurang dilakukan.

Kata kunci: Implementasi, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

ABSTRACT

Problems related to the implementation of the Sustainable Food House Program (KRPL) in Juai District, Balangan Regency include the large number of farmers who own land but are not included in the Sustainable Food House Area (KRPL) program, collaboration between the Balangan Regency Food Security, Agriculture and Fisheries Service and Village Officials and agricultural infrastructure resources are still limited. The aim of the research is to determine the implementation of the Sustainable Food House Program (KRPL) in Juai District, Balangan Regency and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research state that the implementation of the Sustainable Food Home Area Program Policy (KRPL) in Juai District, Balangan Regency (Study in Lalayau Village and Marias Village, Juai District, Balangan Regency) has not been optimal in terms of the first indicator, in terms of environmental conditions. Second, on the aspect of inter-organizational relations, Third, on the aspect of resources, Fourth, on the aspect of the character of the implementing institution. The influencing factors include the driving factors, namely adequate information in the data collection process, then the inhibiting factors include there are still poor people who have not received assistance due to budget limitations, minimal socialization of aid programs, high rates of poverty in village communities and poor supervision of the process. community data collection and low coordination between the government and local village officials and inadequate guidance.

Keywords: Implementation, Sustainable Food House Area (KRPL)

PENDAHULUAN

Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB, mengentaskan kemiskinan, menghasilkan devisa melalui ekspor barang-barang unggulan, dan menjamin ketahanan pangan nasional. Hal ini juga memberikan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya di pedesaan. Dinas Agribisnis memutuskan program, strategi, pedoman, prinsip dan standar yang berkaitan dengan program perbaikan pedesaan masyarakat. Program peningkatan pertanian digambarkan sebagai kegiatan yang mempertimbangkan pemberian aset sebagai aset biasa, manusia, modal, inovasi, keadaan dalam dan luar, pedoman, kemajuan, pekerjaan terbatas dan wewenang.

Karena harga benih unggul relatif mahal, kebijakan pemerintah berupa subsidi atau Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sangat membantu petani dalam memperolehnya. Strategi sponsorship akan membantu peternak dengan informasi yang semakin berkurang sehingga hasil selanjutnya dapat ditingkatkan. Petani juga tidak akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini jika mereka kurang memiliki pengetahuan tentang benih unggul. Peternak harus memahami benih apa yang lebih baik dan bagaimana cara mendapatkannya sehingga suatu saat jika terjadi kekurangan benih, peternak dapat membuat sendiri benih unggulannya. Menghasilkan lebih banyak bisa dilakukan dengan benih unggul. Strategi sponsorship bibit unggul juga dirasakan masih belum tersosialisasikan secara merata, masih banyak peternak yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program parsial sektoral. Seringkali program atau proyek yang dijalankan melibatkan pemberian bantuan nyata kepada masyarakat, seperti pembangunan sarana irigasi, sarana air bersih, mesin pompa, dan sarana produksi pertanian. Faktanya, sebagian besar proyek gagal mencapai potensi penuhnya dan tidak dapat bertahan lama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan program atau tugas, antara lain:

1. Ketidakesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat
2. Paket usaha tidak dilengkapi dengan kemampuan pendukung,
3. Tidak ada latihan observasi yang tertata di tingkat masyarakat
4. Belum ada lembaga yang mendorong keberlanjutan program.

Latihan penguatan kelompok masyarakat kota dilakukan berdasarkan wilayah dengan membentuk lembaga-lembaga baru. Pendirian baru ini bersifat top down, sehingga merugikan permintaan kelembagaan saat ini dan dukungan terhadap organisasi baru ini sebagian besar rendah. Kota-kota dan jaringannya ditempatkan sebagai objek perbaikan dengan tingkat kepentingan wilayah lokal yang sangat rendah. Masyarakat pedesaan menjadi apatis akibat kondisi ini karena dianggap kurang mampu mengelola desanya sendiri. Selain itu, faktor sinergi dan integrasi tersingkirnya ego sektoral berbagai institusi dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan, sehingga tidak hanya menimbulkan kesan tumpang tindih, namun juga sangat rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

Kajian ini penting karena mengkaji program Kementerian Pertanian dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan yang telah dilaksanakan selama sepuluh tahun terakhir, sebagaimana diuraikan di atas.

Program pendekatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penciptaan pertanian di Kabupaten Balangan, serta mampu berkontribusi langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang baru saja diuraikan menunjukkan bahwa ada tiga aspek krusial yang dapat digunakan untuk mendorong ketersediaan stok lebih banyak dan stabilisasi harga produk pertanian..

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, diketahui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari:

1. Penetapan Lokasi, Penerima Manfaat dan Pendamping.
2. Koordinasi, Pendampingan dan Pelatihan.
3. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah:
 - a. Tahap Penumbuhan
 - b. Tahap Pengembangan
 - c. Tahap Kemandirian

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan selama ini dalam pelaksanaan program pertanian masih tergolong belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya petani yang memiliki lahan tetapi tidak termasuk dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diketahui dari data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan pada Desa Lalayau hanya terdapat 2 Kelompok Tani dan pada Desa Marias hanya ada 1 Kelompok Tani dan masing-masing kelompok tani beranggotakan 15 sampai dengan 20 orang sedangkan masyarakat atau petani yang belum termasuk dalam program ini jumlah lahan pertaniannya tergolong banyak atau berpotensi untuk menjadi objek tanam dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari hal ini disebabkan kuota bantuan setiap tahunnya terbatas untuk 1 atau 2 kelompok tani di setiap desanya.
2. Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Aparat Desa setempat yang menjadi objek bantuan Rumah Pangan Lestari dalam hal koordinasi dan pembinaan teknis tergolong kurang optimal khususnya terkait pelaksanaan Program KRPL yang meliputi Koordinasi, Pendampingan dan Pelatihan, Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah seperti Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan meliputi Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian, Pengadaan peralatan dan media tanam seperti polybag, pot, rak, kompos, pupuk, gembor, dll.
3. Sumber daya sarana pertanian yang masih terbatas dilihat dari masih kurangnya sarana penunjang pertanian seperti pupuk, polybag, pot, rak, peralatan pengairan sederhana, dan *sarana* pendukung lainnya seperti tractor untuk pengolahan lahan pertanian yang belum tersedia sehingga masih dilakukan cara tradisional. (*Sumber: Observasi Penulis Bulan Oktober Tahun 2023*)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “**Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan**”.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Harbani Pasolong, 2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, bukan dengan mencoba, dimana ilmuwan sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif dan akibat pemeriksaan subyektif menggarisbawahi makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah

informan sebanyak 16 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

1. Kondisi Lingkungan

a. Kondisi Geografi

Kondisi geografis terkait pelaksanaan Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) tergolong cukup optimal karena wilayah yang mendukung dalam rangka pertanian dan wilayah Kecamatan Juai merupakan wilayah dataran tinggi/ pegunungan.

b. Kondisi Sosial

Desa Lalayau dan Desa Marias menjadi secara kondisi sosial menjadi sasaran yang tepat diketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang tidak bekerja selama musim penghujan sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari diketahui mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Lalayau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 285 Orang dari 1065 Orang Jumlah Penduduknya, Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan mayoritas adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 128 Orang dari 727 Orang Jumlah Penduduknyasehingga dapat dikatakan secara kondisi sosial penduduk cocok sebagai objek penerima bantuan.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari aspek tingkat pendapatan masyarakat Desa Lalayau dan Desa Marias tergolong menengah kebawah dengan adanya Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) menjadikan masyarakat yang menganggur pada masa musim penghujan ini terbantuan namun memang belum dapat menyeluruh karena keterbatasan anggaran.

2. Hubungan antar organisasi

a. Kerjasama Antar Organisasi Pelaksana kebijakan

Kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan kurang optimal dikarenakan rendahnya koordinasi antara petugas dengan aparat desa diketahui dari hasil pendataan yang masih kurang sesuai masyarakat kurang memberikan informasi yang mendetail berkaitan dengan kriteria penerima bantuan hal tersebut disebabkan kurangnya kunjungan dar petugas ke wilayah desa.

b. Koordinasi antar Instansi

Kewenangan petugas dalam melaksanakan tugas dinilai sudah baik sesuai pada tugas pokok fungsinya masing-masing seperti yang bertugas melakukan pengelolaan atau kepengurusan BUMDes di Desa masing-masing kemudian DPMDSos Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur yang melakukan pembinaan terhadap BUMDes.

3. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia tergolong kurang optimal dilihat dari kurangnya jumlah petugas untuk melakukan pendataan menyebabkan pelaporan data tergolong lamban karena setiap pendamping bisa bertugas tidak hanya pada satu desa saja selain itu sumber daya Gapoktan

juga terbatas dari aspek struktur kepengurusan yang kurang optimal dalam rangka pelaksanaan pembinaan maupun pengawasan.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial cukup optimal dan memadai dilihat dari ketersediaan anggaran bantuan tidak ada kendala karena setiap kelompok tani penerima bantuan menerima bantuan yakni sebesar Rp. 85.000.000,-.

c. Sumber daya prasarana

Kondisi sarana prasarana penunjang pelaksanaan program tergolong kurang baik untuk kegiatan pertanian karena masyarakat masih bertani dengan cara tradisional hal ini disebabkan bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana seperti unit traktor belum ada.

4. *Karakter institusi implementor*

a. Kemampuan Melaksanakan Program

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan program KRPL ini tergolong kurang optimal karena dalam jadwal pelaksanaan cukup banyak yang kurang termonitoring seperti Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian namun dalam hal koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Balangan dengan Gapoktan serta Aparat Desa dalam hal penyaluran bantuan dan sosialisasi jenis bantuan dan cara pemanfaatannya, Pendampingan dan Pelatihan upaya penanaman bibit, penggunaan pupuk dan lain sebagainya belum dapat terlaksana secara menyeluruh.

Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Faktor Pendorong

a. Informasi Yang Cukup Memadai Dalam Proses Pendataan

Informasi mengenai masyarakat atau petani yang tergolong sesuai dengan kriteria penerima bantuan di Desa Lalayau dan Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan cukup memadai sehingga bantuan dapat tersalurkan.

2. Faktor Penghambat

a. Masih ada masyarakat (Petani) yang belum menerima bantuan

Sasaran kurang optimal dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan tergolong tidak mampu dan menganggur pada masa musim penghujan ini hanya saja masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan pengalokasian.

b. Minimnya Sosialisasi Program Bantuan

Sosialisasi dari Pemerintah mengenai Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) menjadi belum optimal karena adanya musibah banjir sehingga kunjungan-kunjungan ke tempat binaan kurang dapat dilakukan.

c. Pengawasan yang kurang optimal terhadap proses pendataan masyarakat miskin penerima bantuan hingga penyaluran bantuan

Pengawasan dinilai belum optimal dikarenakan koordinasi antara pihak kantor Kecamatan dengan Aparat desa kurang terjalin baik dalam hal pendataan masyarakat hingga penyaluran bantuan.

d. Pembinaan yang kurang dilakukan

Petugas tergolong kurang optimal karena dalam hal pembinaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sehingga kurang termonitoring seperti Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian.

e. Cuaca yang kurang mendukung dalam kegiatan pertanian

Target penanaman tidak optimal karena sebagian benih Cabe Rawit, Benih Sop, Terong dan Lombok besar yang dibagikan tidak berkembang dikarenakan kondisi cuaca dan kesuburan tanah yang kurang baik.

SIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Desa Lalayau dan Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan) belum optimal dilihat dari indikator *Pertama*, pada aspek kondisi lingkungan meliputi kondisi geografis di Desa Lalayau yang cukup optimal, kondisi sosial masyarakat cukup optimal, kondisi ekonomi masyarakat kurang optimal. *Kedua*, pada aspek hubungan antar organisasi meliputi kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan yang belum optimal selain itu kerjasama antara Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) tergolong kurang optimal, koordinasi antara Tim Teknis Kabupaten dengan Tim Teknis Provinsi tergolong kurang baik dalam hal pendataan untuk penetapan lokasi dan penerima manfaat. *Ketiga*, pada aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia yang kurang optimal karena petugas pelaksana tergolong terbatas, sumber daya finansial tergolong optimal karena bantuan yang diterima masyarakat penerima bantuan Desa Lalayau dan Desa Marias menerima jumlah bantuan yang sama, sumber daya prasarana kurang optimal karena prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pertanian belum ada. *Keempat*, pada aspek karakter institusi implementor meliputi kemampuan melaksanakan program yang kurang optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Desa Lalayau dan Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan) meliputi faktor pendorong yakni informasi yang cukup memadai dalam proses pendataan, kemudian faktor penghambat meliputi masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi program bantuan, tingginya angka kemiskinan masyarakat desa dikarenakan sebagian masyarakat Desa tergolong dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengawasan yang kurang optimal terhadap proses pendataan masyarakat dan koordinasi yang rendah antara pemerintah dengan aparat desa setempat dan pembinaan yang kurang dilakukan dilihat dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian kurang optimal dan cuaca yang kurang mendukung dalam kegiatan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2021. Peraturan Bupati Balangan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, Dan Kelembagaan Ekonomi Tani, 2014. Aktor dan Pelaku Kebijakan Publik. Tersedia: <http://coretanduniapendidikan.blogspot.co.id/2014/11/aktor-dan-pelaku-kebijakan-publik.html> (30 September 2023)

AG. Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di

- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.



- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suplirahim. 2013. *Implementing Public Policy*. Tersedia: <http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html> (30 September 2023)
- Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai. Edisi Revisi.
- Yowanita, Sefni. 2016. *Jenis-Jenis Kebijakan*. Tersedia: http://sefniyowanita.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kebijakan_2.html (30 September 2023)
- Jumiati. 2023. “*Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan*”. STIA Amuntai
- Yuliana. 2022. “*Implementasi Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan*”. STIA Amuntai